

Bab IV

# Faktor Pemicu Pertikaian Komunitas

---



Repository University Of Riau

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU

<http://repository.unri.ac.id/>

## BAB IV

# FAKTOR PEMICU PERTIKAIAN KOMUNITAS

### 4.1. Faktor Sosial Budaya

Konflik atau pertentangan antar kelompok atau komunitas merupakan bentuk dari interaksi sosial yang bisa terjadi pada masyarakat manapun. Berbagai perbedaan kepentingan saling berbenturan sehingga menciptakan konflik dalam berbagai tingkatannya. Masyarakat Bagan Siapiapi merupakan masyarakat yang multikultural, yakni masyarakat yang terdiri dari beragam komunitas dari berbagai aspek. Secara demografis terdapat beberapa kelompok etnis penduduk kota, yang secara kuantitas didominasi oleh warga Cina atau Tionghoa dengan jumlah sebesar 40%. Penduduk tempatan atau Melayu sebanyak 30%, selanjutnya sejumlah 30% terdiri dari etnis Jawa, Batak, Minang, dan Bugis.

Melihat susunan tersebut, maka dapat dipahami bahwa akses ekonomi kota dikuasai oleh warga Cina, mulai dari sektor perdagangan skala besar dan menengah sampai ke perikanan atau yang bermatapencaharian sebagai nelayan miskin. Sementara komunitas yang lain tersebar di semua lapangan pekerjaan,

termasuk sektor politik. Demikian juga mengenai pengelompokan tempat tinggal, sesuai dengan sektor pekerjaan yang dikuasai, maka wilayah perkotaan didominasi oleh komunitas Cina, sementara terdapat kantong-kantong kemiskinan yang didominasi oleh komunitas Jawa dan Melayu, dengan sejumlah kecil komunitas Cina juga. Kebanyakan diantara mereka ini bekerja sebagai petani dan nelayan.

Bersumber dari wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dari berbagai komunitas berhasil diidentifikasi sejumlah konflik atau pertikaian yang pernah terjadi. Secara sosiologis masyarakat daerah penelitian dapat dikelompokkan sebagai penduduk asli atau tempatan, yaitu komunitas Melayu, dan pendatang yang terdiri dari Cina, Jawa, Minang, Bugis, dan Batak. Apabila dilakukan identifikasi atas konflik yang terjadi antara warga tempatan dengan pendatang, maka paling banyak terjadi adalah pertikaian antara komunitas Melayu dengan Batak, dan Melayu dengan Cina. Sementara pertikaian antara komunitas Melayu dengan Bugis hanya terjadi 1 (satu) kali pada sekitar tahun 1965, Melayu dengan Minang terjadi 1 (satu) kali yang merupakan dampak dari kasus PRRI, dan Melayu dengan Jawa tidak pernah terjadi.

Karakter konflik yang pernah terjadi dapat diamati dari penyebab atau pemicu semua pertikaian tersebut. Hampir semua konflik dipicu oleh tindakan kriminal atau premanisme yang melibatkan pemuda-pemuda dari komunitas yang berbeda. Walaupun demikian tetap bisa diidentifikasi adanya potensi-potensi konflik yang terpendam atau laten diantara mereka. Beberapa potensi konflik yang berhasil diungkap, antara lain yang muncul diantara komunitas Melayu dengan Batak adalah perbedaan agama. Sedangkan konflik antara komunitas Melayu dengan Cina, menyimpan latar belakang historis yang cukup panjang dan sarat pula dengan muatan politis.

Temuan ini sesuai dengan pernyataan para analis konflik yang menyatakan bahwa sejumlah kasus pertikaian antar etnis lebih berupa tindak pidana lintas-etnis, dan bukan merupakan kekerasan antar etnis. Kekerasan antar etnis adalah tindakan kolektif yang dilakukan secara relatif terorganisir untuk menghukum sebagian dan atau seluruh anggota etnis darimana si pelaku tindak pidana berasal. Dalam kekerasan etnis, biasanya hanya satu pihak yang relatif terorganisasi, yakni pihak mayoritas, apakah secara kualitas atau kuantitas, dan yang bertindak sebagai pihak penyerang. Namun demikian, tetap dibutuhkan beberapa kondisi yang bisa merubah tindak pidana lintas-etnis menjadi kekerasan etnis, sehingga tidak semua tindak pidana lintas-etnis serta merta menjadi kekerasan antar etnis, sebagaimana konflik antar komunitas yang terjadi di daerah penelitian.

Beberapa keadaan yang disebutkan oleh para ahli sebagai pendorong tindak kriminal lintas-etnis meluas menjadi kekerasan etnis adalah :

1. Terjadinya mekanisme *spiral equilibria*, yakni akumulasi reaksi berantai dari para korban yang tidak bersalah di masa lalu. Dari pengalaman kekerasan etnis, jika terjadi kembali tindak pidana lintas-etnis akan menciptakan kekerasan etnis berikutnya yang lebih besar, demikian berkembang seterusnya secara spiral.
2. Mekanisme penggalangan serta mobilisasi kelompok sejak awal pertikaian terjadi. Jika pihak yang berselisih bertindak sebagai kelompok sejak awal, maka akan memberikan pesan yang mengundang agar pihak lawan bertindak serupa. Berkaitan dengan mekanisme *spiral equilibria*, reaksi yang berlebihan terhadap akumulasi tindak pidana lintas-etnis tidak datang begitu saja, namun terjadi karena adanya mobilisasi sosial. Maka satu hal dapat ditekankan disini bahwa

mengapa kekerasan etnis tidak selalu terjadi dalam situasi konflik sekalipun, adalah karena adanya fakta betapa sulitnya mekanisme penggalangan solidaritas kelompok. Tekanan-tekanan yang dirasakan bersama secara sosial, ekonomi, maupun politik, merupakan sarana untuk menciptakan solidaritas kolektif ini.

3. Kekerasan etnis bukan sekedar konsekuensi kumulatif dari berbagai tindak pidana lintas-etnis, melainkan juga akibat dari muatan pesan yang terkandung dalam tindakan kriminal tersebut. Dalam hal ini pesan yang mampu memunculkan gejala kekerasan adalah apabila melibatkan nilai-nilai yang mendasar, misalnya simbol-simbol keagamaan, etnis, ke-daerahan dan lain sebagainya.
4. Kekerasan etnis ditandai dengan profil aktor-aktor masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dalam situasi normal, warga sipil (non militer) menerapkan kontrol sosial, bertindak mencegah terjadinya kekerasan. Tetapi, dalam situasi kekerasan etnik, konflik adalah milik bersama, dan aliansi di antara para anggota masyarakat memberikan efek destruksi yang lebih besar. Sehingga dapat ditekankan, bahwa semakin banyak warga sipil yang terlibat, semakin besar kecenderungan tindak pidana lintas-etnis berubah menjadi kekerasan antar etnis.

Wawancara mendalam dengan beberapa tokoh masyarakat berhasil mengantar pada identifikasi konflik yang pernah terjadi. Pertikaian antara komunitas Melayu dengan Batak yang terjadi pada tahun 2002, diawali oleh pertikaian antar pemuda di sebuah kedai kopi, yang berujung pada tewasnya seorang pemuda Melayu. Peristiwa ini lalu menjadi besar dan digeneralisir dengan melibatkan identitas kelompok etnis. Selama 2 (dua) minggu kondisi tidak aman, timbul ancaman-ancaman yang di-

arahkan pada komunitas Batak. Akan tetapi konflik ini tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan dengan damai oleh para tokoh masyarakat dengan bantuan aparat keamanan.

Merujuk pada penjelasan tentang karakteristik munculnya kekerasan etnis, pertikaian antara komunitas Melayu dengan Batak termasuk pada tindak pidana lintas-etnis. Tidak ditemukan adanya aspek historis berkaitan dengan pengalaman kekerasan diantara kedua etnis tersebut sebelumnya, mobilisasi kelompok mungkin memang terjadi tetapi tidak sampai muncul penggalangan solidaritas sosial yang melibatkan semua lapisan anggota masyarakat termasuk warga sipil. Hal ini terbukti dari tindakan para tokoh dan aparat keamanan yang segera bisa mendamaikan keadaan. Perbedaan diantara kedua komunitas ini yang kiranya dapat mengakibatkan perbenturan yang cukup mendasar adalah perbedaan agama, yang walaupun menjadi media identitas etnis dan digunakan sebagai sarana ancaman, tidak juga meningkatkan intensitas konflik menjadi kekerasan antar agama. Akan tetapi dengan potensi konflik seperti ini para tokoh masyarakatpun hingga saat ini tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi, terutama jika dipicu oleh tindak-tindak pidana tertentu.

Pertikaian lainnya yang berskala lebih besar adalah yang terjadi antara komunitas Melayu dengan komunitas Cina, tepatnya sekitar bulan oktober/november tahun 1998. Awal dari pertikaian massal ini adalah perselisihan antar pemuda Melayu dengan Cina yang berakhir dengan adanya korban luka parah di pihak Melayu. Hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat mengemukakan adanya elite politik yang memanfaatkan keadaan ini seiring dengan insiden 1998 di Jakarta. Berbagai isu yang kurang bertanggungjawab lalu memperkeruh suasana, misalnya dengan menyebar berita bahwa korban dibawa ke rumah sakit di Pekanbaru dan meninggal dunia sebelum tiba di tujuan. Akibatnya terjadi situasi yang sangat rawan, yaitu pen-

jarahan dan pembakaran rumah-rumah, dimana komunitas Melayu bertindak sebagai penyerang dan komunitas Cina sebagai korban. Kemudian ditengah kerusuhan, muncul hasutan-hasutan bahwa orang Cina akan mengadakan pembalasan. Situasi baru dapat ditenangkan kembali ketika para tokoh adat berkomunikasi, dan diadakan upacara potong kerbau sebagai simbol perdamaian dan kemakmuran bersama.

Deskripsi konflik yang terjadi menunjukkan bahwa pertikaian tersebut adalah sebuah kekerasan etnis berskala kecil, yang sebelumnya didahului oleh tindak pidana lintas-etnis. Sesuai hasil wawancara mendalam, beberapa faktor yang signifikan menciptakan situasi kekerasan etnis dapat disebutkan, yaitu :

### **1. Faktor historis dan *spiral equilibria***

Secara historis, pengalaman terjadinya kekerasan etnis pada masa lalu, diikuti dengan berbagai bentuk stereotype diantara kedua etnis merupakan kekuatan yang sangat besar untuk membangkitkan tindakan kolektif. Sekelompok nelayan Cina mulai masuk ke wilayah ini pada tahun 1882, dan mendarat di Kubu. Lalu keyakinan mereka kepada petunjuk *pekong* menuntun mereka agar berlabuh di Bagan Siapiapi, suatu wilayah yang akan memberi keberuntungan pada mereka secara turun-temurun. Agar kebersamaan tetap terpelihara untuk membangun wilayah baru, mereka membakar tongkang yang mereka gunakan, sehingga tidak satu orangpun dapat berlayar kembali ke tempat asal.

Berdasarkan riwayat yang mereka percayai ini, maka orang-orang Cina merasa telah ‘membuka’ serta ‘membangun’ wilayah ini, dan ritual serta upacara pembakaran tongkang (menggunakan model kertas) mereka jalankan setiap tahun untuk memperingati jasa para leluhur. Ketika itu komunitas Cina menyebar



ke seluruh pelosok wilayah, bahkan sampai ke pedesaan, menguasai dan mengendalikan sistem ekonomi, sementara penduduk tempatan yang terdiri dari Melayu dan Jawa tinggal di hutan-hutan. Orang Jawa sudah tinggal di wilayah ini sejak masa penjajahan Hindia Belanda, yaitu para pekerja Deli yang melarikan diri. Latar belakang sejarah seperti ini mengembangkan stereotype diantara keduanya. Orang Melayu beranggapan “orang Cina telah menginjak kepala nenek moyang dan kakek-kakek kita”, dan sebutan ‘wanang’ untuk orang Melayu dan Jawa, yang artinya ‘orang hutan’, sementara ‘tenang’ untuk orang Cina, yang artinya ‘orang kota’.

Sedangkan orang Cina beranggapan bahwa penduduk tempatan selalu iri pada keberhasilan orang-orang Cina disini dan itu diungkapkan dengan membakar dan menjarah rumah mereka tanpa sebab yang jelas. Pada tahun 1946, satu tahun setelah kemerdekaan, terjadi pula perebutan wilayah antara komunitas pendatang (Cina) dengan komunitas Melayu. Melayu disini sebenarnya adalah gabungan dari beberapa kelompok etnis yang menganggap dirinya sebagai bangsa Indonesia. Tetapi, bagaimanapun juga, karena pertikaian fisik ini disemangati oleh perjuangan untuk mempertahankan wilayah dari penjajahan bangsa lain, maka peristiwa ini lebih membekas bagi komunitas Melayu, sebagai penduduk asli wilayah ini, daripada bagi orang-orang Jawa misalnya. Pertikaian ketika itu bisa disebut sebagai perang kemerdekaan dan perebutan wilayah, dan pihak Cina banyak mendapat bantuan tentara dan persenjataan dari Malaysia.

Berbeda dengan pertikaian sejenis yang banyak terjadi di beberapa daerah lainnya, yang biasanya diakhiri dengan kemenangan dan dominasi oleh satu pihak, dan penolakan serta pengusiran terhadap pihak yang lain, pertikaian yang mengakibatkan jatuhnya ratusan korban dari kedua belah pihak ini, berakhir dengan damai. Kedua komunitas lalu tetap hidup berdampingan

dalam satu wilayah, dengan segregasi spasial yang berubah, yakni sebagian besar dari komunitas Cina mengelompok di pusat kota, sedangkan komunitas Melayu menyebar ke seluruh wilayah. Berkaitan dengan mekanisme spiral, ternyata tidak terlalu bekerja dalam konflik antar komunitas Cina dengan Melayu disini, karena tidak tampak terjadinya akumulasi reaksi berantai dari kedua pihak.

## **2. Penggalangan solidaritas kelompok dan profil aktor**

Solidaritas kelompok dapat diciptakan oleh kesamaan-kesamaan nasib dan tekanan yang dialami ketika berhadapan dengan kelompok lain. Dari informasi yang diperoleh di lapangan disebutkan bahwa terdapat kecemburuan sosial terhadap keberhasilan ekonomi warga Cina, yang merebak di kalangan tertentu. Selain itu, seiring terjadinya insiden ‘anti cina’ di ibukota negara, maka muatan politis menjadi kekuatan pendorong yang dalam sekejap mampu memobilisasi massa serta menciptakan sebuah solidaritas kolektif yang sangat kuat. Dengan demikian, walaupun semula pertikaian yang terjadi adalah merupakan tindak pidana lintas-etnis, solidaritas kelompok yang bermuatan politis mampu menghasut dan menyatukan hampir seluruh lapisan untuk bergerak dengan satu tujuan.

Konflik menjadi luas karena telah terjadi penghancuran serta pembakaran rumah-rumah warga Cina. Akan tetapi tidak berlarut-larut dan menjadi kekerasan etnis yang sangat intens karena tidak menyentuh nilai-nilai mendasar atau merusak rumah ibadah. Sehingga banyak pendapat yang menyatakan, konflik pada saat itu hanyalah pertikaian atau tindak pidana lintas-etnis, yang ditimbulkan oleh beberapa faktor yang saling menguatkan, serta mendorong mekanisme munculnya sebuah solidaritas kelompok. Kekerasan etnis mungkin memang ter-

jadi, karena beberapa faktor yang berpotensi menciptakannya sudah mulai bekerja, antara lain adanya benih-benih kebencian dan stereotype, latar belakang historis diantara mereka, diperkuat lagi oleh ketimpangan sosial ekonomi, dan yang paling penting diiringi oleh iklim politis yang terjadi pada saat itu. Tetapi, karena keterlibatan nilai-nilai yang mendasar juga tidak ditemukan, sehingga solidaritas kelompok juga tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat, serta tidak mengorganisir kekuatan yang dibutuhkan, maka kekerasan tidak berlangsung lama, dan segera muncul tokoh-tokoh masyarakat yang mengusahakan perdamaian.

Kesimpulan yang berkaitan dengan potensi konflik yang ditemukan di wilayah penelitian adalah :

1. Dimensi sosial-ekonomi, termasuk disini aspek historis dan efek spiral yang diciptakan, ketimpangan dan kesenjangan ekonomi antar komunitas,
2. Dimensi budaya, termasuk disini keterlibatan perbedaan nilai dan orientasi hidup antar komunitas, antara lain eksklusivitas yang disertai segregasi spasial dan sosial (pengelompokan secara spasial dan sosial), primordialisme pada masing-masing komunitas.

Potensi konflik ini merupakan benih-benih kebencian antar komunitas, yang berpotensi untuk menggalang sebuah solidaritas keompok yang cukup kuat, dan untuk mengorganisir sebuah konflik berskala tidak pidana lintas-etnis menjadi sebuah tindak kekerasan antar etnis dengan intensitas yang tinggi.

#### **4.2. Faktor Sosial Ekonomi**

Ada banyak faktor yang memicu konflik horizontal, salah satunya adalah faktor ekonomi, terutama muncul dalam bentuk kesenjangan kesejahteraan atau dalam bahasa Karl Marx kesen-

jangan penguasaan faktor produksi dimana sekelompok kecil orang menguasai sebagian besar faktor produksi sementara mayoritas masyarakat hanya menguasai sebagian kecil faktor produksi. Dalam bagian ini akan diungkap serinci mungkin tentang factor ekonomi sebagai faktor pemicu konflik di Bagan Siapi-api dan Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir. Dalam pengungkapan ini dicoba sejauh mungkin mengungkap latar belakang keterkaitan factor ekonomi sebagai akar pemicu konflik.

Konflik horizontal yang pernah terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya kota Bagan Siapi-api tergolong sangat rumit dan luas baik dilihat dari jenis konflik maupun akar konflik (faktor penyebab konflik). Jika dilihat dari jenisnya, konflik di daerah ini dapat dikategorikan konflik etnis karena melibatkan entis tertentu yang berhadapan dengan etnis lain. Uniknya konflik yang terjadi di Bagan Siapi-api mendudukkan etnis Melayu sebagai pusat konflik berhadapan dengan etnis lain, meskipun kejadiannya tidak dalam waktu bersamaan. Sepanjang sejarah konflik yang terjadi di Kota Bagan Siapi-api tercatat seluruhnya melibatkan etnis Melayu yang berhadapan dengan etnis Minang (1955), Cina (1998), dan Batak (2002). Sementara konflik yang terjadi pada tahun 1946 yang dapat dikatakan pemicu konflik pertama di Bagan Siapi-api mendudukkan komunitas Cina sebagai pusat konflik berhadapan dengan hampir semua etnis atau komunitas yang ada.

Secara sederhana dapat dikatakan konflik saat itu adalah pertentangan antara komunitas non pribumi berhadapan dengan komunitas pribumi. Jika dilihat dari sumber konflik, tercatat ada beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik tersebut, antara lain faktor politik (konflik 1946), faktor budaya (konflik 1955), dan faktor ekonomi (1998).

Di daerah Bagan Batu, sebuah daerah (kota) yang baru berkembang, konflik yang pernah terjadi (sejak 1992 hingga

2006) didominasi oleh factor ekonomi. Meskipun di daerah ini pernah terjadi konflik yang dipicu oleh factor budaya yang melibatkan etnis Melayu dan Batak, dan agama yang melibatkan komunitas Muslim dan Budha, namun kedua konflik itu tidak dominan dan tidak berkembang luas.

Berdasarkan kondisi yang dipaparkan di atas, maka bahasan dalam bab ini akan dititik beratkan pada analisis faktor ekonomi sebagai akar konflik yang terjadi di kedua wilayah, yaitu Bagan Siapi-api dan Bagan Batu.

Faktor ekonomi merupakan salah satu pemicu konflik yang sangat potensial. Hal ini tidak saja untuk kasus konflik yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, melainkan juga kasus-kasus lain di Indonesia seperti Konflik Ambon. Untuk kasus Bagan Siapi-api, faktor kesenjangan ekonomi memberi kontribusi cukup signifikan terhadap terjadinya konflik antara komunitas Cina dan Melayu tahun 1998. Untuk melihat secara lebih jernih akar konflik tersebut harus dilakukan penelaahan jauh kebelakang, karena sebenarnya kerusuhan tahun 1998 itu tidak lain hanyalah ledakan dari akumulasi akar konflik yang sudah berlangsung sekian lama.

Disini peninjauan akan dimulai dari sekitar tahun 1882, karena tahun ini dapat dianggap sebagai titik awal perkembangan daerah Bagan Siapi-api. Penetapan tahun ini sebagai titik awal telaah juga hanya didasarkan pada informasi dari tokoh masyarakat Cina bernama Andang Wijaya karena tidak ada catatan resmi yang dapat dijadikan dasar.

Berdasarkan informasi dari tokoh ini, pada sekitar tahun 1882 itu mendarat sekelompok etnis Cina dengan menggunakan perahu di satu daerah yang saat ini dikenal dengan Kecamatan Kubu, yang letaknya berdekatan dengan Bagan Siapi-api. Kelompok orang perahu ini berlayar dari salah satu wilayah di

Thailan yang pada awalnya berjumlah tiga perahu, namun karena gangguan alam dan kelemahan navigasi maka yang sampai ke Kubu hanya satu perahu yang berisi 18 orang. Dari 18 orang ini terdiri dari 17 orang suku Ang dan satu orang suku Kho. Kedatangan mereka ke Kubu ini lebih dipengaruhi oleh usur mitos yang bersumber dari Toape Khong (batung dewa agung) yang mereka bawa darai daratan Cina. Salah seorang dari orang perahu ini bermimpi ditemui oleh Dewa Agung, yang memesankan kepadanya bahwa mereka hanya boleh mendarat untuk bermukim ditempat yang bercahaya. Lalu mereka melihat isyarat mimpi itu di daerah Kubu, maka mereka memutuskan berhenti di situ. Namun beberapa waktu kemudian mereka melihat di tempat lain yang cahayanya lebih terang lagi dan mereka memutuskan pindah ke daerah baru tersebut yang saat ini di kenal dengan kota Bagan Siapi-api. Menurut kesaksian dari Andang Wijaya bahwa daerah Kota Bagan Siapi-api waktu itu belum berpenghuni, kelompok orang perahu inilah yang pertama membuka wilayah tersebut yang kemudian berkembang menjadi kota Bagan Siapi-api.

Keterangan sejarah yang berbau mitos ini tidak cukup kuat untuk menjadi argument rasional dalam menjawab pertanyaan mengapa kelompok manusia perahu itu memilih menetap di Bagan Siapi-api. Argumen ekonomi kelihatan lebih rasional memperjelas masalah ini. Berdasarkan penjelasan dari hampir semua sumber informasi dan bukti sejarah ekonomi Bagan Siapi-api bahwa daerah ini merupakan penghasil ikan terbear saat itu. Faktor inilah yang menjadi daya tarik terkuat, karena terbukti pada perkembangan selanjutnya Bagan Siapi-api merupakan penghasil ikan terbesar di Indonesia dan pengusaha-pengusaha ikan dari kota kecil ini sangat berpengaruh hingga ke Pulau Jawa.

Dampak ekonomi perikanan ini sangat luas dalam kehidupan perekonomian masyarakat Bagan Siapi-api dan sekitarnya. Paling tidak terdapat tiga bentuk perkembangan ekonomi yang disebabkan perkembangan sector perikanan ini. Pertama adalah terbukanya daerah ini dengan dunia luar terutama Malaysia dan Singapura yang merupakan dua pusat perdagangan penting di Asia. Produksi perikanan Bagan Siapi-api hingga era 70-an masih menjadi komoditas ekspor penting di Riau yang mempertemukan jalur bisnis internasional Riau-Malaysia-Singapura beriringsn dengan produksi perikanan dari daerah Kepulauan Riau. Pembeli produk perikanan Bagan Siapi-api sebenarnya sangat luas meliputi hampir seluruh Negara industri di Asia seperti Jepang dan Hongkong, namun jalur ekspornya tetap dikuasai oleh Singapura dan sebagian kecil Malaysia.

Kedua, berkembangnya sector-sector perekonomian lainnya seperti retail dan perdagangan secara umum. Sektor ini berkembang seiring dengan perkembangan kota Bagan Siapi-api dan pertumbuhan penduduk baik yang bermukim di lingkungan kota maupun desa-desa sekitarnya. Sektor yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari ini perkembangannya linier dengan kebutuhan penduduk, artinya semakin bertambah penduduk kebutuhan akan semakin meningkat sehingga tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga meningkat. Ketiga, berkembangnya industri perkapalan (kapal kayu) sebagai pendukung ekonomi perikanan. Industri perkapalan ini berkembang dipengaruhi secara langsung oleh dua hal, yaitu kebutuhan armada penangkapan ikan dan ketersediaan bahan baku berupa hutan subur yang menyediakan kayu bermutu untuk bahan baku kapal. Hingga era 80-an di sekitar Bagan Siapi-api masih terdapat hutan yang menyediakan bahan baku yang dibutuhkan untuk industri perkapalan. Namun pada era 90-an

hutan di sekitar Bagan Siapi-api habis akibat eksploitasi besar-besaran oleh jaringan kapitalisme global. Akibatnya industri perkapalan ini akhirnya ditutup karena kesulitan bahan baku disamping akibat faktor politik, yaitu kebijakan pemerintah daerah yang tidak secara tegas terhadap izin perdagangan kayu.

Perkembangan ekonomi ini telah menjadikan bagan Siapi-api sebagai daerah yang memiliki daya tarik ekonomi tersendiri sehingga mengundang berbagai komunitas luar datang ke kota kecil ini. Meskipun jumlah pendatang ini tidak terlalu besar namun cukup membangun komposisi heterogenitas kota Bagan Siapi-api. Hingga akhir tahun 2006 estimasi komposisi heterogenitas penduduk Bagan-Siapi-api terdiri dari Cina menduduki urutan pertama terbanyak, diikuti oleh Melayu, Jawa, Minang, Batak, dan lain-lain.

Yang sangat menarik dari perkembangan ini adalah seluruh sector ekonomi di atas didominasi oleh komunitas Cina. Ini sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan dan pola pemukiman masyarakat Bagan Siapi-api dan sekitarnya. Tingkat kesejahteraan umumnya masyarakat Cina lebih tinggi dari masyarakat komunitas lainnya, dan mereka umumnya bermukim di daerah kota dan berperan penting dalam mengendalikan pusat-pusat perekonomian. Komunitas lainnya lebih banyak bermukim di daerah pedesaan dan pinggiran kota dengan mata pencarian utamanya adalah buruh dan petani.

Lebih menarik lagi adalah setelah terpilihnya Anas Makmun sebagai Bupati Rokan Hilir pada awal 2006 ekspansi bisnis komunitas Cina memasuki wilayah baru yang selama ini relatif belum mereka kuasai, yaitu proyek-proyek yang didanai oleh APBD. Menurut informasi dari Marjharudin seorang tokoh dari masyarakat Sulawesi di Bagan Siapi-api kebijakan Anas Makmun saat ini cukup kondusif terhadap kepentingan bisnis



komunitas Cina di sektor pemerintah baik yang bersekala besar maupun kecil. Informasi ini sesuai dengan informasi dari Acheng tokoh cina dari Bagan Batu. Hal ini menimbulkan suasana persaingan yang semakin ketat dan sulit bagi komunitas pribumi yang selama ini mendominasi sector ini, karena itu kebijakan Anas ini mulai mendapat sorotan dari masyarakat luas.

Kondisi serupa juga terjadi di Bagan Batu. Di daerah ini komunitas Cina relative tetap mendominasi sektor-sektor perdagangan sementara sektor perkebunan dikuasai oleh pengusaha besar (kelompok kapitalis) yang berasal dari luar Rokan Hilir. Masyarakat lokal pribumi rata-rata hanya menguasai lahan kurang dari 10 hektar per keluarga.

Ketimpangan penguasaan sector ekonomi ini nampaknya sangat penting untuk dijadikan salah satu pertimbangan untuk menganalisis akar dari konflik yang pernah terjadi di Bagan Siapi-api dan sekitarnya. Konflik 1998 di Bagan Siapi-api yang melibatkan komunitas Melayu dan komunitas Cina merupakan konflik yang kuat diperkirakan bersumber dari factor ekonomi. Jelasnya konflik tersebut merupakan bentuk pelampiasan kecemburuan social masyarakat Melayu terhadap ketimpangan penguasaan factor ekonomi yang relative didominasi komunitas Cina. Konflik seperti ini dengan mudah dapat terjadi ketika pihak yang “kalah dalam persaingan ekonomi” tidak memiliki kesempatan atau tidak mampu melihat dan memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk ikut menjadi bagian yang menguasai perekonomian. Untuk memahami konflik ini dari perspektif ekonomi harus dilihat posisi ekonomi dari kedua komunitas tersebut.

Posisi ekonomi komunitas Cina relatif sudah cukup tergambar pada paparan di atas, sementara posisi ekonomi masyarakat Melayu relatif belum tergambar secara khusus.

Masyarakat Melayu mengklaim diri sebagai komunitas asli dari daerah Rokan Hilir umumnya dan desa-desa di sekitar Bagan Siapi-api khususnya, dan klaim ini dibenarkan oleh banyak pihak berdasarkan sejarah penyebaran komunitas dan budaya Melayu yang merentang sepanjang pesisir Pulau Sumatera, Kalimantan, hingga ke Afrika. Jauh sebelum kedatangan komunitas Cina pada tahun 1882 ke wilayah Sumatera dan membuka daerah kosong yang kemudian dikenal dengan kota Bagan Siapi-api, disekitar daerah ini telah terdapat banyak desa-desa yang dihuni oleh komunitas Melayu. Secara tradisional komunitas ini mengelola ekonomi sector pertanian dan perikanan (nelayan) yang seluruhnya dikelola secara tradisional. Sebagaimana umumnya masyarakat tradisional di Indonesia dalam mengelola ekonomi adalah bersifat sub sisten yaitu mengelola ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak untuk orientasi pasar. Pada kondisi masyarakat dengan model pengelolaan ekonomi seperti ini tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut tidak dapat diharapkan meningkat secara memadai. Kondisi inilah yang dialami oleh masyarakat Melayu di sekitar Bagan Siapi-api.

Interaksi komunitas Melayu sebagai masyarakat local dengan komunitas Cina khususnya sebagai pendatang tidak menyebabkan perubahan pola pengelolaan sumber ekonomi melalui pengembangan teknologi sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Cina yang secara simultan melakukan perbaikan teknologi penangkapan ikan. Hal ini terbukti dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat Cina dari cara penangkapan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana (jaring tradisional dan perahu tanpa mesin) ke teknologi menengah (jaring dan perahu dengan mesin tempel), dan selanjutnya mesinisasi dalam teknologi penangkapan (kapal mesin dan pukat harimau/trawl).

Selanjutnya pada masa orde baru terjadi interaksi yang lebih luas antara komunitas Melayu dengan komunitas lainnya terutama komunitas Jawa yang datang ke Rokan Hilir melalui program transmigrasi yang dibiayai pemerintah. Program transmigrasi ini disamping menambah pola heterogenitas penduduk Rokan Hilir juga memberi sentuhan teknologi baru di bidang pengelolaan sumber ekonomi, terutama disektor pertanian yaitu dengan dikenalkannya teknologi perkebunan sawit. Disamping itu transmigrasi dari Jawa ini juga memperkenalkan teknologi pengolahan lahan untuk tanaman pangan terutama padi sawah dan padi ladang. Namun faktor-faktor ekonomi tersebut tidak memberikan perubahan signifikan pada komunitas Melayu. Meskipun mereka juga dilibatkan dalam program-program tersebut melalui pola transmigrasi lokal, namun ketertarikan komunitas Melayu terhadap teknologi dan kultur baru dalam pengolahan sumberdaya ekonomi tidak begitu besar sehingga penguasaan mereka terhadap faktor-faktor produksi sangat terbatas.

Konsep penguasaan faktor produksi disini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan, meskipun keduanya ada keterkaitan. Yang dimaksud dengan penguasaan faktor produksi disini lebih pada makna penguasaan lahan dan teknologi yang mendukung proses produksi sehingga mampu menggerakkan produktifitas. Sementara kesejahteraan disini lebih ditekankan maknanya pada kemampuan memenuhi kebutuhan konsumtif. Secara teoritis penguasaan faktor produksi akan berbanding lurus (linier) dengan kesejahteraan, karena itu ketertinggalan relative komunitas Melayu dalam penguasaan faktor produksi ini menjadikan kondisi kesejahteraan mereka relatif tertinggal dibanding dengan komunitas Cina khususnya. Namun ketika dibandingkan dengan komunitas pribumi lainnya seperti Jawa, Batak, dan Minang, tidak terjadi ketimpangan kesejahteraan

yang berarti. Namun yang sangat penting untuk dicatat di sini adalah “ketertinggalan relative” komunitas Melayu dalam penguasaan faktor produksi berupa lahan dan teknologi pengolahan sumber daya akan menjadi penyebab ketergantungan komunitas ini terhadap investasi pihak lain. Dalam kedudukan seperti ini komunitas Melayu hanya akan terserap sebagai buruh dalam sebuah proses investasi, sehingga kesejahteraannya akan sangat tergantung pada kelancaran dan keberlanjutan investasi ini. Keadaan inilah yang dialami oleh komunitas Melayu di Bagan Siapi-api dalam menghadapi perkembangan ekonomi local. Ketika investasi di sektor perikanan berkembang baik (industri penangkapan ikan dan perkapalan) banyak yang dapat menikmati “kesejahteraan terbatas” sebagai buruh. Namun ketika investasi disektor ini menurun maka kelompok buruh ini tidak mudah mencari pekerjaan lain sebagai pengganti, sementara mereka tidak menguasai faktor produksi lainnya. Pola ketergantungan seperti inilah yang sangat kuat mendorong kecemburuan sosial terhadap kelompok lain.

Ketergantungan ekonomi ini, meskipun posisinya adalah variabel penentu, sebenarnya lebih berperan sebagai factor laten dalam sebuah proses konflik. Faktor ini memerlukan variable lain sebagai perantara yang kemunculannya sangat situasional. Biasanya semakin dekat variable antara ini dengan kondisi emosional suatu komunitas akan semakin besar peluangnya memicu konflik. Dalam kasus kerusuhan 1998 di bagan Siapi-api, factor ketokohan atau meminjam bahasa pemerintah “actor intelektual” merupakan variable antara yang menjadi pemicunya. Actor intelektual inilah yang telah berhasil membangkitkan emosi kecemburuan social komunitas Melayu terhadap komunitas Cina. Momentum yang dimanfaatkan oleh actor intelektual ini adalah perkelahian antar remaja yaitu antara seorang anak laki-laki dari komunitas Cina dengan seorang anak laki-

laki dari komunitas Melayu. Kebetulan anak Melayu ini mengalami cedera akibat perkelahian itu sehingga kondisi ini memberi peluang untuk memperbesar isu. Tokoh “intelektual” masuk melalui titik ini dengan cara mengisukan bahwa cedera yang dialami oleh anak Melayu tersebut sangat parah dan kelengkapan medis di Bagan Siapi-api (yang ketika itu masih berstatus puskesmas pembantu) tidak mampu menangani kasus ini. Skenario selanjutnya adalah membawa korban ke Pekanbaru untuk mendapat perawatan yang memadai. Setelah korban dibawa ke Pekanbaru, scenario berikutnya dijalankan yaitu dengan mengisukan bahwa korban telah meninggal diperjalanan menuju Pekanbaru dengan menggunakan kata-kata yang bernilai provokatif sara yaitu “Cina membunuh Melayu”. Isu inilah yang kemudian dihembuskan dengan cepat dan meluas, sehingga terjadi pembakaran toko-toko milik komunitas Cina. Menurut informasi dari sumber komunitas Cina (Andang Wijaya), ketika terjadi kerusuhan banyak masyarakat yang melakukan penjarahan, dan kelihatannya penjarahan ini direncanakan karena toko-toko yang dibakar itu sudah dikosongkan terlebih dulu. Barang-barang jarahan tersebut dibawa melalui jalan laut dengan menggunakan perahu yang telah dipersiapkan.

Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa demikian mudah masyarakat (khususnya komunitas Melayu) terpancing emosi sehingga melakukan pembakaran kota hanya dengan isu “Cina membunuh Melayu”? Sebenarnya emosi semacam ini tidak mudah untuk mengalami ledakan dalam radius yang luas tanpa ada factor “laten konflik yang potensial”. Berdasarkan analisis ekonomi di atas dapat diyakini bahwa kesenjangan dalam penguasaan factor produksi atau kesenjangan dalam kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu akar masalah, sehingga kasus yang sangat pribadi antara dua remaja yang bertikai dapat dengan mudah diangkat ketinggian konflik komunitas. Kecemburuan

social akibat dari perbedaan kesejahteraan ini sudah terakumulasi sekian lama. Komunitas Melayu melihat bahwa minoritas Cina memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi, mudah mencari pekerjaan, dan tidak ada yang menganggur, sementara masyarakat dari komunitas Melayu melihat dirinya berada pada keadaan yang sebaliknya. Kecemburuan sosial ini kemudian bergesekan dengan pemicunya yang bisa muncul dalam berbagai bentuk termasuk pertikaian pribadi sebagaimana yang terjadi pada tahun 1998 tersebut.

Konflik di Bagan Batu memiliki kehususan tersendiri ketika diukur dari perspektif konflik horizontal, karena yang terlibat adalah perorangan disatu pihak berhadapan dengan kelompok masyarakat dipihak lain. Orang perorangan itu jika dilihat status sosialnya adalah anggota masyarakat biasa (pensiunan militer) yang memiliki modal cukup kuat (kapitalis) namun tidak tampil dalam bentuk badan hukum (perusahaan) melainkan sebagai individu. Dengan finansial yang besar dan jaringan relasi yang cukup luas dia berhasil menggerakkan tenaga pendukung (tenaga sewaan) yang dimasyarakat dikenal dengan istilah “preman”. Kelompok preman sewaan inilah yang digerakkan oleh tokoh perorangan tersebut untuk menteror masyarakat. Kasus ini dikenal dengan kasus “Ampaian Rotan”.

Kasusnya bermula pada tahun 1992 sekelompok preman sewaan menteror masyarakat kelompok petani sawit di daerah yang bernama Ampaian Rotan. Kelompok preman yang mengatas namakan Timbang Sianipar mengklaim bahwa lahan yang digarap masyarakat di daerah Ampaian Rotan itu adalah milik Timbang Sianipar dan memerintahkan masyarakat untuk meninggalkan lahannya. Masyarakat menolak mematuhi perintah itu karena merasa telah membeli lahan tersebut secara resmi dan mereka memiliki surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Namun ternyata Timbang Sianipar juga memiliki

surat-surat resmi. Kasus ini sebelum dibawa ke pengadilan telah sempat menimbulkan kekerasan fisik

Konflik Ampaian Rotan ini mirip dengan konflik kelas karena membenturkan kepentingan antara seorang pemilik modal (kapitalis) dengan masyarakat. Dalam konflik ini kedua kelompok menunjukkan karakter khusus yang cukup menarik. Pihak Timbang Sianipar tampil sebagai pemilik modal yang didalam melakukan proses investasinya dengan menggunakan tekanan (repressiveness), sebuah pola pendekatan yang sering ditampilkan oleh kelompok militer di beberapa Negara berkembang termasuk Indonesia terutama pada masa Orde Baru. Timbang Sianipar sebagai pensiunan militer berperan sebagai pemilik modal yang melakukan tekanan pada masyarakat tampil mengatas namakan pribadi tidak perusahaan (badan hukum formal).

Hal ini sangat berbeda dengan umumnya kelompok kapitalis yang selalu tampil sebagai pemilik perusahaan. Dinegara-negara berkembang seperti negara-negara Asia Tenggara, militer atau pensiunan militer tampil sebagai kapitalis adalah hal yang biasa. Yoshihara Kunio dalam bukunya *The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia* menamakan kelompok militer atau pensiunan militer yang terjun ke dunia bisnis dengan *military capitalism*. Dalam praktek bisnisnya kelompok ini tidak tertutup menggunakan pendekatan-pendekatan kekuatan dan tekanan baik fisik maupun non fisik, tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan dengan lebih mudah. Lazimnya *military capitalism* ini tampil sebagai perusahaan tidak atas nama individu seperti halnya Timbang Sianipar.

Dipihak lain, kelompok masyarakat petani yang berhadapan dengan Timbang Sianipar bukanlah kelompok buruh, melainkan berstatus pemilik lahan (faktor produksi) yang

disengketakan. Hal inilah yang membedakan konflik ini dengan konflik horizontal lainnya terutama kasus-kasus konflik di Bagan Siapi-api yang jelas membenturkan kelompok-kelompok komunitas tertentu. Konflik Ampaian Rotan bukan konflik komunitas karena kelompok masyarakat petani yang terlibat terdiri dari berbagai komunitas (etnis). Dia juga bukan konflik kelas karena kedua pihak yang terlibat adalah sama-sama pemilik modal. Namun konflik ini juga tidak termasuk konflik structural karena Timbang Sianipar bukan representasi dari Negara.

Konflik lain yang juga laten di Bagan batu adalah konflik antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan perkebunan. Akar konflik tetap berpusat pada factor ekonomi yaitu perebutan lahan. Konflik ini cukup banyak terjadi dan merupakan jenis konflik yang dominan di Bagan Batu sementara penyelesaiannya juga belum bisa dianggap final karena salah satu pihak terutama kelompok masyarakat belum bisa memahami secara hukum status lahan yang diperebutkan. Kelihatannya konflik perebutan lahan di Bagan Batu relative mudah dipicu melalui isu-isu sederhana seperti isu penyerobotan lahan oleh sebuah perusahaan.

Konflik lain yang kelihatan dari luar adalah bernuansa sara terjadi pada tahun 2002 di Bagan Batu antara komunitas Budis (Budha) yang mayoritas Cina dengan komunitas Melayu sebagai komunitas Islam. Konflik ini dari luar kelihatan sebagai bentuk penolakan sekelompok orang Melayu Muslim terhadap kehadiran sebuah Vihara sebagai rumah ibadah kelompok Budha. Isu yang dibangkitkan untuk menyulut konflik adalah masyarakat Cina merupakan kelompok orang pendatang yang ingin menguasai daerah orang Melayu dan upacara peribadatan kelompok Budha banyak menyediakan makanan-makanan yang diharamkan orang Islam terutama daging babi. Isu ini meresah-



kan sebagian masyarakat sehingga terjadi penyerangan dan perusakan terhadap Vihara tersebut.

Meskipun konflik ini dapat diselesaikan dengan tindakan cepat dari aparat pemerintah, namun potensi konfliknya masih tersimpan baik yang memungkinkan pada saat lain muncul kembali. Konflik ini harus ditelusuri dari para pihak yang terlibat konflik. Kelompok Melayu yang terlibat konflik adalah kelompok orang yang selama ini merasa termarginalisasi dalam proses persaingan ekonomi yaitu relative tidak berhasil dalam penguasaan lahan perkebunan dan lapangan pekerjaan. Isu yang dihindarkan adalah isu yang sangat bernuansa ekonomis yaitu “penguasaan daerah” yang bermakna “penguasaan factor produksi”. Isu ini diperkuat dengan kenyataan bahwa kelompok Cina merupakan komunitas yang menguasai perekonomian cukup baik. Berdasarkan kondisi ini maka konflik yang terjadi relative lebih mudah untuk difahami bersumber dari factor ekonomi.

#### **4.3. Faktor Sosial Politik, Pemerintahan, dan Otonomi Daerah**

Faktor–factor yang menyebabkan terjadinya pertikaian antara kelompok komunitas, terutama komunitas Melayu dengan komunitas yang lain, - Cina, Batak, Sulawesi, yang telah terjadi sebanyak 6 kali, antara lain adalah faktor social budaya yang merupakan factor pemicu, sedangkan faktor ekonomi dan politik merupakan faktor akar masalah. Tulisan ini diharapkan dapat mengungkapkan dan menggambarkan pertikaian yang terjadi di Rokan Hilir dan faktor–faktor khas yang mempengaruhi terjadinya pertikaian tersebut.

Sejumlah konflik menonjol yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir merupakan konflik yang kemudian berkembang menjadi kekerasan. Konflik yang berwujud perbedaan pendapat antara

pihak-pihak yang terkait merupakan kondisi alamiah dan bahkan merupakan ciri perkembangan, perubahan dan kemajuan masyarakat. Namun, apabila konflik-konflik alamiah yang ada pada masyarakat tidak dapat dikendalikan dan berubah menjadi kekerasan, maka masyarakat akan mengalami kemunduran bahkan hancurnya peradaban.

Konflik merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam sebuah kehidupan sosial. Konflik memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi penyelesaian dan dimensi keduanya adalah dimensi bentuk. Hal yang pertama memiliki dua ujung yakni terjadinya perpecahan dan tindak kekerasan yang melahirkan disintegrasi, sementara pada ujung lainnya terjadi konsolidasi setelah perbedaan-perbedaan dapat ditemukan solusinya. Oleh karena itu, konflik perlu diantisipasi sedemikian rupa agar ujung pertama yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dan kerugian dapat dihindari.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menangkap makna bahwa konflik dan kekerasan adalah berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada bentuk dan cara penyelesaian. Konflik terjadi tanpa kekerasan dan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Konflik akan melahirkan harmonisasi setelah tercapainya sebuah kesepakatan di atas perbedaan-perbedaan yang ada. Beberapa penyebab timbulnya konflik adalah kesenjangan sosial, kemakmuran tidak merata, akses dan kekuasaan yang tidak seimbang.

Beberapa sebab terjadinya konflik sebagaimana disebut di atas bilamana melahirkan tindakan diskriminasi, pengangguran, penindasan dan tindak kejahatan lainnya, maka ia tidak dapat lagi disebut sebagai konflik melainkan kekerasan. Jadi, konflik tidak selamanya mengandung kekerasan, tetapi dalam kekerasan sudah pasti terdapat konflik (Fisher dkk, 2000:4).

Secara lebih tegas, Fisher dkk mendefinisikan konflik sebagai hubungan yang tidak cocok antara dua pihak atau lebih, termasuk dalam cara mencapai sasaran/tujuan mereka, sementara kekerasan didefinisikan sebagai sebuah tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan dan atau menghalangi seseorang atau kelompok orang untuk meraih potensinya secara penuh.

Kekerasan menurut Ibrahim dkk (2000:4) memiliki tiga dimensi dimana dua dimensi diantaranya tidak tampak dan hanya satu sisi saja yang merupakan kekerasan tampak. Dua kekerasan yang tidak tampak tersebut adalah 1. sumber kekerasan yang berupa nilai, 2. kekerasan struktur yang meliputi sistem, konteks dan struktur, dua bentuk kekerasan ini merupakan kekerasan melembaga dan memberi kontribusi luar biasa pada bentuk dan intensitas kekerasan tampak.

Sejak 1946 telah terjadi 6 kali pertikaian antar anggota kelompok komunitas di Rokan Hilir (Riau) yaitu 3 kali antara anggota komunitas melayu dengan anggota komunitas cina (yang disebut dengan tionghoa) yang terjadi pada beberapa kawasan di kabupaten Rokan Hilir yaitu di Bagan Siapiapi dan Bagan Batu, 2 kali antara anggota komunitas melayu dengan anggota komunitas Batak yang terjadi di kota Bagan Siapiapi dan Bagan Batu. Sementara, terjadi 1 kali antara anggota komunitas Melayu dengan anggota komunitas Bugis yang berlangsung di Bagan Siapiapi.

Dibanding dengan pertikaian–pertikaian sebelumnya, pertikaian yang terjadi pada tahun 1998 antara anggota komunitas Melayu dan anggota komunitas Cina tidak sampai menelan korban jiwa, namun ratusan rumah anggota komunitas Cina musnah terbakar dengan kerugian harta benda bernilai milyaran rupiah.

Dari 6 kali pertikaian tersebut, 3 kali diantaranya terjadi antara dua komunitas Melayu dengan Cina, 2 kali di Bagan Siapiapi dan sekali di Bagan Batu. Sementara 2 kali pertikaian terjadi antara komunitas Melayu dengan komunitas Batak, sekali di Bagan Siapiapi dan sekali di Bagan Batu. Satu pertikaian lagi terjadi antara komunitas Melayu dengan komunitas Bugis/Sulawesi. Dari 6 kali pertikaian tersebut semuanya melibatkan komunitas Melayu. Pertikaian terbesar dan menelan korban yang cukup banyak, pertama terjadi pada tahun 1946 antara komunitas Melayu beserta sejumlah komunitas yang lain seperti Jawa dan lain-lainnya dengan komunitas Cina. Korban jiwa berjumlah ratusan dari kedua belah pihak.

Pertikaian ini terjadi di Kota Bagan-siapiapi dan dipicu oleh ulah sekelompok komunitas Cina yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Mereka mengibarkan bendera Kuomintang (Cina Nasionalis), kemudian diturunkan paksa oleh masyarakat komunitas Melayu dan lain-lainnya. Peristiwa itu berkembang mejadi pertikaian yang memakan korban ratusan jiwa dari kedua belah pihak. Peristiwa ini, sedikit banyak, telah mempengaruhi hubungan yang tidak kondusif antara komunitas Melayu dengan komunitas Cina sampai sekarang. Kedua, terjadi pada tahun 1998 antara komunitas Melayu dengan komunitas Cina. Pertikaian ini tidak memakan korban jiwa, tetapi ratusan rumah komunitas Cina dibakar dengan kerugian harta benda berjumlah milyaran rupiah. Pertikaian ini terjadi di Kota Bagan-siapiapi dan dipicu oleh terjadinya perkelahian antara dua pemuda Melayu dan Cina di area sekitar pelabuhan. Orang Melayu yang terlibat perkelahian mengalami luka serius, kemudian dibawa ke rumah sakit di Pekanbaru dan diisukan meninggal dunia. Isu itu cukup keras, dan mendorong emosi komunitas Melayu yang kemudian melakukan perusakan dan pembakaran.

Kedua pertikaian besar di atas telah menelan kerugian harta benda dan korban nyawa yang tidak kecil, yang menimbulkan kepedihan mendalam, ketakutan, trauma dan dendam yang latent. Bahkan kebencian mendalam kedua belah pihak yang tidak mudah dihapuskan dapat memicu pertikaian sewaktu-waktu bila terdapat pemicu yang cukup bagi mereka untuk mengulangi konflik.

Faktor politik yang dibahas pada bagian ini berkenaan dengan pemerintahan dan otonomi daerah. Ketidakjelasan otonomi di daerah, dibanding dengan daerah lain seperti antara lain Sumatra Barat, Jawa Barat, apalagi Yogyakarta, merupakan masalah yang berkepanjangan dan ini antara lain disebabkan oleh tidak hanya kekhawatiran pemerintah pusat akan kehilangan penghasilan sangat berarti dari kebebasan yang diberikannya kepada daerah Riau, termasuk Rokan Hilir, yang cukup kaya dan potensial dalam segi SDA, tetapi juga oleh sangat kurangnya, kalau boleh disebut, tidak adanya perhatian diberikan pemerintah pusat kepada daerah ini. Hal kedua ini merupakan akibat dari fakta bahwa ada kesan tidak banyak orang Riau, termasuk Rokan Hilir, yang berada di Jakarta yang bersedia menjadi pelobi-pelobi “ulung” untuk memperjuangkan kepentingan Riau, termasuk Rokan Hilir, di Pemerintah Pusat.

Ketidakjelasan dan keengganan pemerintah pusat memberikan otonomi daerah yang luas dan riil kepada daerah sampai dengan keluarnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 menimbulkan konsekuensi logis bagi daerah ini sebagai berikut:

1. Hubungan pusat dan daerah dilaksanakan sangat sentralistis.
2. Pejabat-pejabat yang akan menduduki jabatan teras dan strategis dikirim atau didrop dari atau oleh pemerintah pusat.
3. Timbulnya dan meningkatnya kemiskinan struktural.

Sampai dengan keluarnya dua UU di atas, ada kesan desentralisasi masih belum sepenuhnya dilaksanakan dan sentralisme untuk hal-hal yang sebenarnya tidak lagi perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam era otonomi daerah (Otda), seperti misalnya antara lain urusan kehutanan, perdagangan lintas batas, urusan pos lintas batas dan urusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), masih tetap dipraktekkan. Hal ini tentu saja merugikan daerah, khususnya masyarakat pedalaman yang bermukim tidak jauh dari kawasan perbatasan. Konsekuensi pertama ini merupakan perwujudan keengganan Pemerintah Pusat menyerahkan otda, khususnya kepada daerah-daerah yang tidak memiliki putra-putra terbaik mereka di Departemen atau Instansi Pusat.

Dalam era reformasi, otonomi daerah sebenarnya merupakan kesempatan emas khususnya bagi rakyat di daerah yang kaya akan SDA untuk memperoleh kesejahteraan secara maksimal. Tetapi kesempatan emas seperti itu belum juga terealisasikan, karena kedua UU tersebut mengandung sejumlah distorsi yang melahirkan perbedaan filosofi dasar mengenai otonomi daerah itu sendiri. Perbedaan filosofi tersebut melahirkan paling tidak dua cara pandang alternatif terhadap otonomi daerah, yaitu : a. Otonomi Daerah sebagai otonomi masyarakat daerah dan bukan hanya sekedar otonomi Pemda, b. Otonomi Daerah sebagai hak daerah yang sudah ada secara tradisional pada masyarakat setempat, dan bukan sebagai hal baru yang merupakan belas kasihan pusat dan kewajiban daerah.

Konsekuensi logis dari cara pandang pertama adalah bahwa kebijakan otonomi daerah harusnya ditujukan pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat di daerah, dan bukan hanya otonomi daerah Pemda sehingga hanya dinikmati oleh para elit politik daerah di jajaran Pemda, Kepala Daerah dengan segala aparturnya maupun di DPRD. Kon-

sekuensi logis dari cara pandang kedua adalah bahwa otonomi daerah sebagai hak tradisional masyarakat tidak dapat dicabut oleh Pempus. Kewenangan Pusat hanya terbatas pada penyerahan dan pengaturan wewenang yang sudah ada pada daerah melalui berbagai kebijakan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Bagaimana kenyataan otonomi daerah dan pelaksanaannya di Riau, termasuk di Rokan Hilir? Dari segi pelaksanaan otonomi daerah saja, sebenarnya telah terjadi konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini Pemda dan masyarakatnya selama Republik Indonesia berjalan, khususnya dalam 3 dekade pemerintahan Orba. Salah satu faktor utama yang menimbulkan pertikaian memprihatinkan di Rokan Hilir adalah ketidaksesuaian atau pertikaian pusat–daerah mengenai hak-hak otonomi masyarakat daerah dan hak–hak tradisional masyarakat daerah yang keduanya merupakan hak asasi mereka. Konflik ini menjalar sampai ke bawah. Konsekuensi lebih lanjut dari perbedaan tersebut adalah jangankan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat daerah dilaksanakan dan diprioritaskan, bahkan hak-hak tradisional mereka di daerah dikesampingkan oleh pemerintah pusat dan pemda. Eksekutif menjadi lebih dominan dari pada legislatif pada era Orba, sebaliknya legislatif mendominasi eksekutif pada era reformasi dan pusat masih mendominasi daerah. Dominasi pemerintah pusat terhadap daerah dan masyarakatnya lebih tampak jelas terhadap daerah–daerah yang sabar, lembut, menjadi “anak baik”, tidak pernah berkeinginan berontak, dan tidak memiliki wakil di kabinet seperti Riau, termasuk Rokan Hilir.

Puncak dari ketidak-pedulian dan dominasi pusat terhadap hak–hak masyarakat daerah dapat dilihat paling tidak dari dua hal: pertama, pejabat yang duduk pada jabatan teras strategis, seperti Gubernur, Bupati, Kepala Dinas Propinsi dan Kepala

Dinas Kabupaten, sebelum UU No. : 22/1999 diundangkan, dikirim dan ditetapkan dari pusat. Putera Daerah yang menjadi pejabat penting, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, khususnya kabupaten Rokan Hilir, sangat sedikit. Bahkan kabupaten Rokan Hilir yang merupakan kabupaten baru, pemekaran dari kabupaten Kampar dan kabupaten Bengkalis, terjadi konflik tajam antara pemerintah pusat dan masyarakat mengenai tempat kedudukan Ibu Kota Kabupaten. Kondisi konflik ini dapat memicu konflik-konflik horizontal baru di masa yang akan datang. Kedua, hancurnya SDA dan lingkungan sebagai akibat dari kurangnya komitmen dan rasa memiliki dari para pejabat yang didrop dari pusat itu, kedua hal negatif yang merupakan wujud dari ketidakpedulian pusat sangat menyakiti hati masyarakat, khususnya masyarakat setempat dimana lingkungan ini hancur. Pejabat penting, seperti gubernur, bupati dan para pejabat teras dan strategis lainnya, sebagian besar sudah dikuasai oleh kalangan sendiri, putera daerah, namun mereka belum menampakkan komitmen dan kompetensinya dalam membela kepentingan masyarakat. Hal ini tetap merupakan akar konflik laten yang dapat timbul sewaktu-waktu di masa mendatang.

Sentralisme yang berlebihan dapat pula menimbulkan kemiskinan struktural bagi daerah dimana sentralisme itu dipraktekkan. Walaupun Riau, termasuk Rokan Hilir, tergolong daerah yang cukup kaya dibandingkan dengan daerah lain seperti Sulawesi Tenggara, NTT, tetapi pada tahun 1990-an daerah ini pernah menduduki peringkat tinggi sebagai penduduk miskin. Di samping itu Riau, khususnya Rokan Hilir, juga memiliki peringkat pendidikan yang cukup memprihatinkan. Mayoritas penduduknya berpendidikan sekolah dasar. Kondisi kemiskinan ekonomi dan keterpurukan pendidikan ini merupakan dampak dari tidak adanya otonomi daerah yaitu ketidak-



berdayaan pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam memanfaatkan dan mengelola SDA maupun mengelola keuangan daerah. Ini terbukti Riau menyetero penghasilan daerah yang bersumber dari SDA ke pusat cukup signifikan secara nasional, tetapi setelah dikembalikan lagi ke daerah dan diterima dalam bentuk APBD, Riau menerima dalam jumlah yang sangat sedikit.

Rendahnya APBD yang diterima dari pusat dibanding dengan penghasilan dari daerah sendiri, menimbulkan kesulitan besar bagi masyarakat kecil, khususnya masyarakat yang berdomisili di kawasan pedalaman dan perhuluan jauh dari kota-kota besar. Kondisi ini dirasakan langsung oleh anggota komunitas Melayu di kawasan pedalaman, bahkan pinggiran kota, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan keresahan kepada pemerintah pusat.

Berbeda dengan anggota komunitas Melayu, anggota komunitas Cina, yang sebagian besar tinggal di kota, hampir tidak merasakan hantaman sebagai akibat dari ketiadaan otonomi daerah, maupun dari krisis ekonomi dan politik, karena mereka adalah pekerja keras, pedagang yang trampil, dan hemat. Dalam krisis ekonomi dan politik taraf ekonomi mereka tetap mengalami peningkatan, walaupun secara perlahan-lahan tapi pasti. Dari segi politik, anggota komunitas Cina pada umumnya memiliki afiliasi politik yang relatif konsisten, dalam arti selalu berusaha memilih partai-partai politik yang berkuasa, seperti Golkar, PDIP atau Demokrat. Pilihan semacam ini dianggap oleh sejumlah tokoh komunitas Melayu sebagai penghalang dan ancaman terhadap ambisi mereka maupun keinginan mereka untuk mendorong tokoh Melayu untuk lebih leluasa dalam kekuasaan, bahkan pada pilkada langsung pertama di Rokan Hilir, komunitas Cina termasuk yang menang.

Perubahan daya kepengikutan pada masyarakat Melayu

dari tokoh adat ke elit politik dan ketergantungan mereka terhadap elit politik mereka, ditambah dengan kepentingan maupun ambisi politik jangka pendek dari para elit politik tersebut mendorong timbulnya pembenturan dengan anggota komunitas Cina yang dianggap dalam jangka panjang merupakan penghalang dalam perebutan peluang politik dan ekonomi. Ketakutan dan trauma komunitas Cina akibat konflik pada tahun 1998 dapat berdampak pada lebih solidnya komunitas Melayu untuk upaya mendominasi lembaga-lembaga politik, baik di eksekutif maupun di legislatif. Hal ini juga dapat memiliki arti yang signifikan yang mampu memperlancar strategi politik jangka panjang mereka.